**IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DALAM KAJIAN KEPERDATAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi dan Memperoleh Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

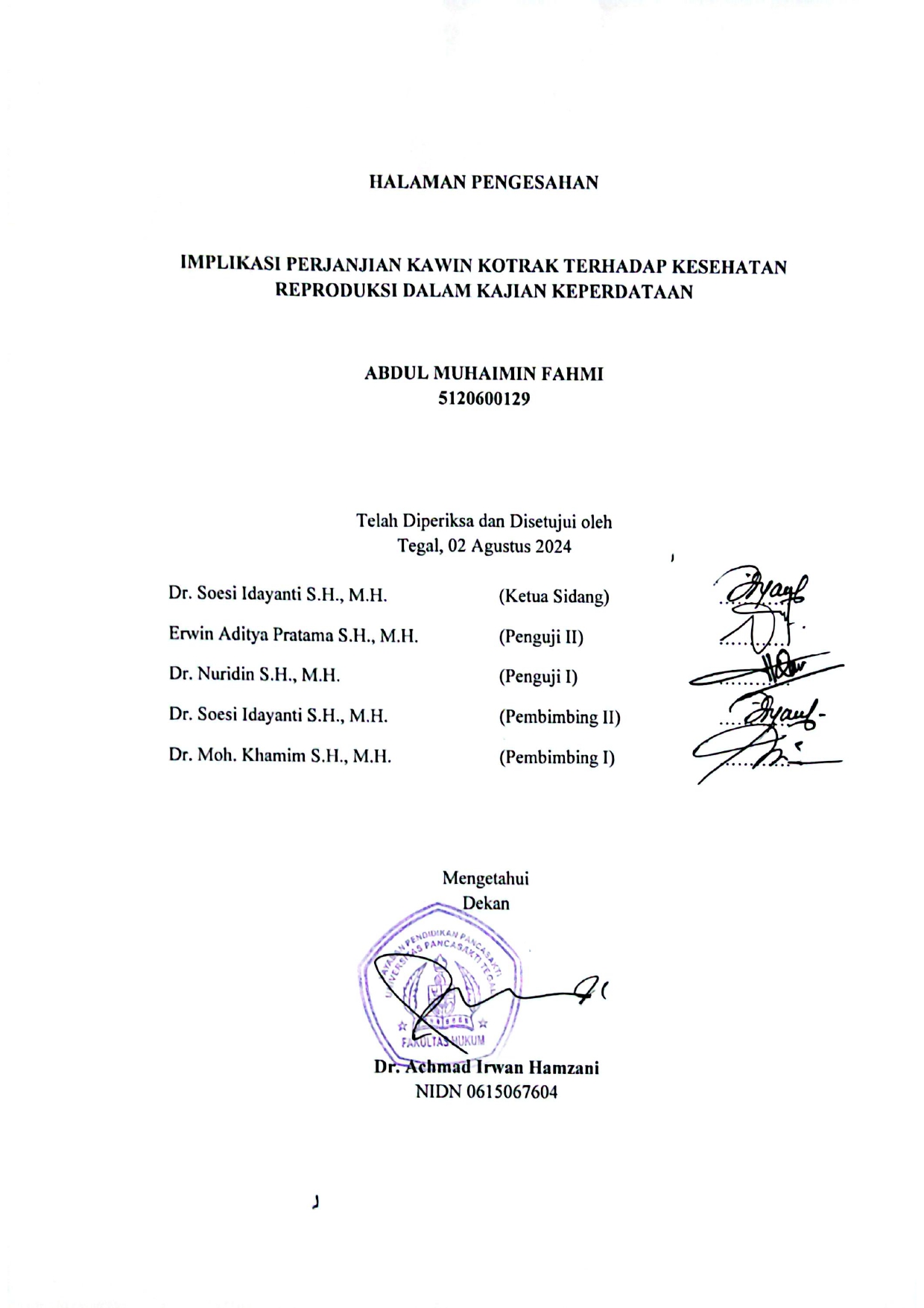
**ABDUL MUHAIMIN FAHMI**

**NPM 512060129**

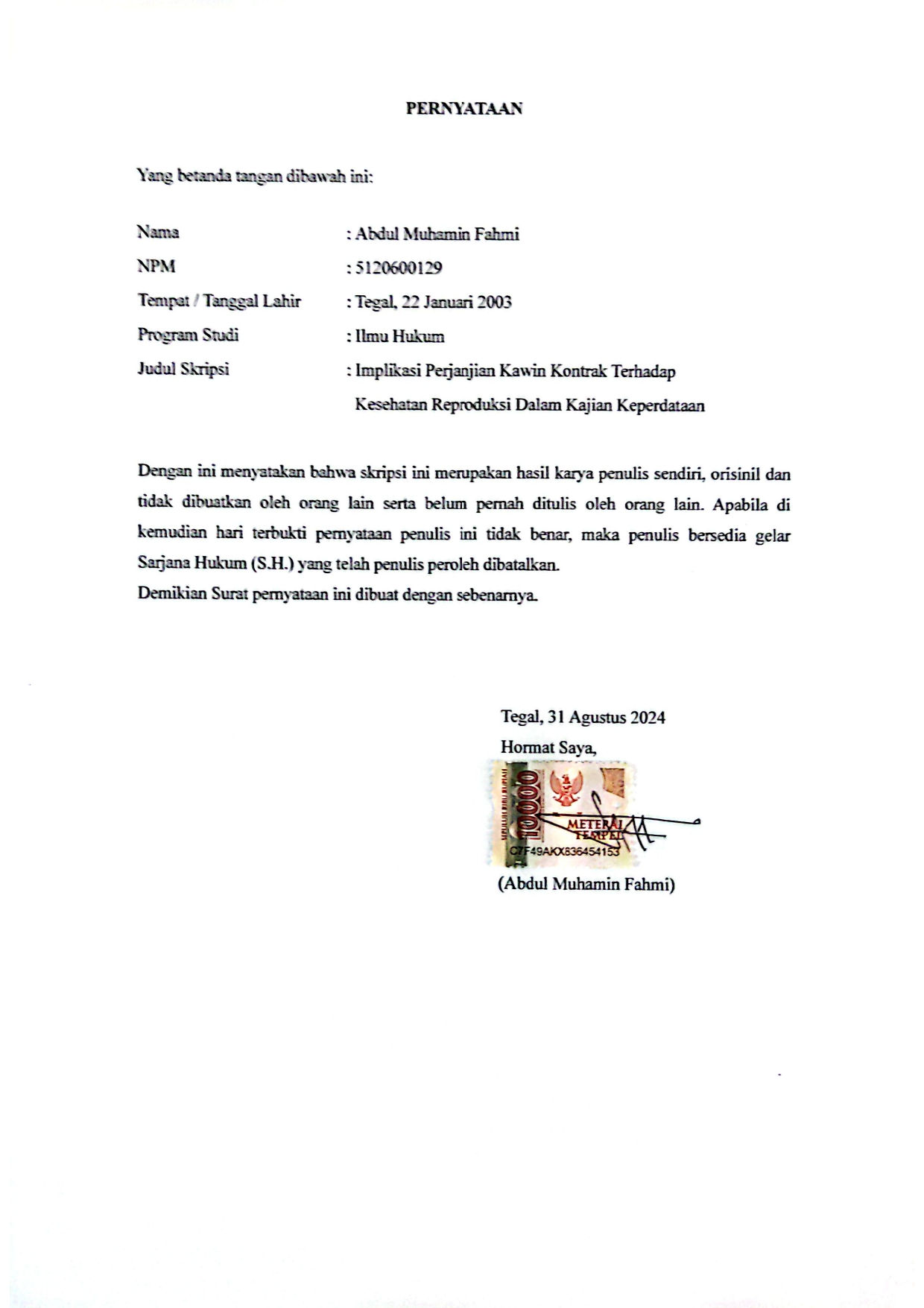
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

Abstrack

Perjanjian perkawinan mut’ah atau yang sering disebut kawin kontrak merupakan praktik yang mengizinkan pernikahan sementara antara seorang pria dan seorang wanita dengan syarat dan batasan tertentu. Praktik ini telah menjadi subjek perdebatan di antara ulama Islam dan berbagai mazhab, dengan pandangan yang beragam tentang keabsahannya dan kondisi yang mengikatnya. Perjanjian kawin kotrak turut mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan, antara lain si pelaku akan melakukan berulang ulang dan ganti-ganti pasangan setelah waktu yang telah disepakati selesai. Pengetahuan mengenai perjanjian kawin kotrak sebagai pemicu gangguan kesehatan reproduksi, merupakan focus penelitian yang penting karena kawin kotrak bukan hanya masalah internal dari pelaku ke pelaku, tetapi juga problematika yang memiliki akar bercabang serta merupakan implikasi social yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui aplikasi/Penerapan perjanjian perkawinan mut'ah terhadap kesehatan reproduksi dalam kajian regulasi Kesehatan; 2) mengetahui dampak dari pernikahan mut'ah terhadap kesehatan reproduksi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah penelitian field research melalui pendekatan penelitian yuridis empiris dengan mempergunakan data sekunder yang diperoleh lewat metode kepustakaan dengan analisis kualitatif. Konklusi dari penelitian ini bahwa implikasi perjanjian kawin kontrak terhadap kesehatan reproduksi adalah 1) akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi; 2) gangguan kesehatan reproduksi. Sedangkan upaya penanggulangan-nya antara lain 1) pendidikan dan kesadaran masyarakat; 2) Pendekatan Terpadu; 3) Konseling dan dukungan psikologis; 4) Pendidikan Keluarga; 5) Program Pendidikan Kesehatan Keluarga; 6) Peningkatan regulasi pencegahan; 7) Intervensi terhadap Anak; dan 8) Monitoring dan Evaluasi Program.

**Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan Mut’ah, Kesehatan Reproduksi**

Abstract

A mut'ah marriage agreement or what is often called a contract marriage is a practice that allows temporary marriage between a man and a woman with certain conditions and limitations. This practice has been the subject of debate among Islamic scholars and various schools of thought, with varying views about its validity and the conditions binding it. Contract marriage agreements also cause ongoing problems, including that the perpetrator will repeat and change partners after the agreed time is over. Knowledge about contract marriage agreements as a trigger for reproductive health problems is an important research focus because contract marriage is not only an internal problem from perpetrator to perpetrator, but is also a problem that has branching roots and has deep social implications. This research aims to : 1) know a application/Implementation of mut'ah marriage agreements on reproductive health in the study of Health regulations; 2) know the impact of mut'ah marriage on reproductive health. The type of research used in this study is field research using an empirical juridical research approach using secondary data obtained through library methods with qualitative analysis. The conclusion of this research is that the implications of contract marriage agreements for reproductive health are 1) access to reproductive health services; 2) reproductive health problems. Meanwhile, countermeasures include 1) education and public awareness; 2) Integrated Approach; 3) Counseling and psychological support; 4) Family Education; 5) Family Health Education Program; 6) Increased preventive regulations; 7) Intervention for Children; and 8) Program Monitoring and Evaluation.

**Keywords: Agreement, Mut'ah Marriage, Reproductive Health**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

Sungguh segala pujian hanya kepada Allah ﷻ, kita memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kita memohon ampunan dan berlindung kepada Allah ﷻ Tuhan Yang Maha Agung yang memberikan penulis kemudahan dalam segala urusan yang ada di hidup penulis. Dengan penulisan Skipsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Masyarakat. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat.

2. Bapak & Ibu penulis. Alhamdulillah terima kasih untuk kerja keras dan doa tulus dari kedua orang yang semoga Allah ﷻ menjaga dan merahmati mereka.

3. Pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas bimbingannya. Kepada Dr. Moh. Khamim, M.H. serta kepada Dr. Soesi Idayanti, M.H. yang telah mengarahkan dan membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kakak penulis. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan ini sendirian dengan kerja dan usaha penulis.

6. Teman dekat penulis. Terima kasih sudah menyemangati penulis.

**MOTO**

“La tahzan innallaha ma'ana”

QS. At-taubah : 40

“Dokter tidak berjanji setelah kau berobat akan sembuh, Guru tidak berjanji setelah kau belajar akan pintar, tapi Allah berjanji setelah kau perbaiki sholat mu Dia akan memperbaiki hidupmu”

“Sebuah hubungan yang abadi tidak membutuhkan kontrak, ia dibangun dari kepercayaan dan komitmen yang tulus*”*

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah ﷻ, Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah ﷺ, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas

Pancasakti Tegal).

1. Fajar Dian Ariyani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas

Pancasakti Tegal).

1. Dr. Moh Khamim, S.H., M.H. (Dosen pembimbing I), Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah ﷻ sebagai amal shalih.
3. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
4. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari penulis yang memberikan dukungan moral pada penulis dalam menempuh studi.
5. FR. Ardiansyah yang membuat penulis semangat untuk menuntaskan skripsi.
6. Teman penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah ﷻ membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah ﷻ. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 17 Agustus 2024

Hormat Saya,



# Abdul Muhaimin Fahmi

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI ii](#_Toc174679905)

[BAB I 1](#_Toc174679906)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc174679907)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc174679908)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc174679909)

[C. Tujuan Penelitian 6](#_Toc174679910)

[D. Manfaat Penelitian 6](#_Toc174679911)

[E. Tinjauan Pustaka 7](#_Toc174679912)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc174679913)

[G. Sistematika Penulisan 14](#_Toc174679914)

[BAB II 15](#_Toc174679915)

[TINJAUAN KONSEPSUAL 15](#_Toc174679916)

[A. Tinjauan Tentang Nikah 15](#_Toc174679917)

[B. Tinjauan Tentang Nikah Kontrak 22](#_Toc174679918)

[C. Tinjauan Tentang Kesehatan Reproduksi 33](#_Toc174679919)

[BAB III 45](#_Toc174679920)

[HASIL DAN PEMBAHASAN 45](#_Toc174679921)

[A. Penerapan Hak Perlindungan Kesehatan Nikah Kontrak Menurut Regulasi Pemerintah 45](#_Toc174679922)

[B. Dampak Hukum Perikatan Nikah Kontrak Terhadap Kesehatan Reproduksi 50](#_Toc174679923)

[BAB IV 60](#_Toc174679924)

[PENUTUP 60](#_Toc174679925)

[DAFTAR PUSTAKA 63](#_Toc174679926)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Permasalahan pernikahan kontrak, yang terkadang disebut sebagai “kawin kontrak”, secara konsisten menarik perhatian di beberapa ranah, terutama di kalangan para ahli hukum Islam. Dalam hal ini, masyarakat umum lebih sering merujuk pada kawin kontrak, sedangkan kiai, atau pemuka agama Islam, lebih sering menggunakan istilah kontrak.

Kata “kesenangan” dan “kenikmatan” secara etimologis memiliki keterkaitan dalam nikah mut;ah. Tujuan pernikahan nya sendiri adalah untuk mencapai kesenangan sesaat. Secara definisi, nikah kontrak mengacu pada pernikahan dengan batasan waktu yang ditentukan oleh kesepakatan bersama antara calon pasangan. Sesuai kesepakatan awal, kedua belah pihak memiliki opsi untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan ketika jangka waktu yang ditentukan telah berlalu. Pernikahan kontrak dibedakan dari pernikahan biasa dengan penentuan jangka waktu ini.

Syara' mendefinisikan kontrak sebagai ketika seorang pria menikahi seorang wanita dengan imbalan uang untuk waktu yang telah ditentukan. Selain itu, masa pernikahan berakhir ketika jangka waktu yang disepakati bersama berakhir, dan pria dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Wanita diharuskan menunggu dua kali haid untuk mengetahui apakah ada janin di dalam rahimnya atau tidak. Tidak ada hak waris di antara keduanya jika salah satu dari keduanya meninggal dunia dan masih ada hubungan atau akad (kontrak).[[1]](#footnote-1)

Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad Saw sebenarnya mengizinkan pernikahan kontrak. Islam masih mengalami fase transisi pada saat itu, beranjak dari masa Jahiliyah. Bagi mereka, perzinahan sudah menjadi hal yang biasa di masa Jahiliyah. Nabi Muhammad Saw tidak langsung mengizinkan pernikahan kontrak. Fakta bahwa umat Islam pada saat itu tidak hidup dalam ketenangan di rumah-rumah mereka berkontribusi pada pembolehan tersebut. Sebaliknya, mereka sedang dalam perjalanan menuju pertempuran. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:[[2]](#footnote-2)

“*kami pernah berperang bersama Rasulallah Saw., sedang istri-istri kami tidak turut serta dalam bersama kami. Kemudian kami bertanya pada Rasulallah, apakah boleh berkebiri? Maka Rasulallah Saw., melarang kami berbuat demikian dan memberikan ”****rukhsah”*** (keringanan)*supaya kami kawin dengan permpuan dengan maskawin sehelai baju untuk satu waktu tertentu”.*

Sebagai hasilnya, Nabi Muhammad mengizinkan pernikahan kontrak di antara para pengikutnya karena pernikahan ini memberikan cara alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umatnya pada saat itu. Hal ini juga merupakan langkah menuju terciptanya aturan perkawinan yang ideal, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, yang secara bertahap melarang alkohol.[[3]](#footnote-3) Dalam keadaan darurat dan terpaksa, nikah kontrak diperbolehkan; jika tidak, sekali lagi, nikah kontrak dilarang. seperti yang dikatakan dalam Hadis Rasulullah, yang diriwayatkan oleh beberapa Sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib :

“*Dari Sabrah al-Juhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rasulallah Saw., dalam peperangan Fathul Makkah, kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin kontrak. Katanya: Kamudian ia (sabrah) tidak pernah keluar sehingga Rasulallah Saw., mengharamkan kawin kontrak itu*”. (H.R. Muslim).[[4]](#footnote-4)

Hadis-hadis yang disebutkan di atas memberikan rincian lebih lanjut, yang menyatakan bahwa: pertama, Sabrah Al-Juhani dikatakan telah menemani Nabi pada saat penaklukan Mekah dan mengizinkan personel tentara Muslim untuk mengambil bagian dalam kontrak. Namun ia melarangnya ketika mereka hendak meninggalkan kota.[[5]](#footnote-5) Kedua, menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kontrak dengan sabdanya, “*Wahai manusia, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan kontrak. Kini ketahilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.*”[[6]](#footnote-6) Terakhir, diriwayatkan oleh Ali r.a. bahwa Nabi melarang memakan daging keledai peliharaan di Khaibar dan melarang pernikahan kontrak.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, para ulama, tokoh mayarakat dan beberapa ahli hukum menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang terhormat, di mana suami dan istri menjalani hari-hari mereka bersama. Untuk memenuhi kewajiban dan hak suami dan istri secara tepat, sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014” “Perkawinan nikah kontrak atau pernikahan sementara memiliki implikasi yang kompleks terhadap kesehatan reproduksi”, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata. Dampak dari pernikahan jangka pendek ini terhadap kesehatan reproduksi-termasuk kemungkinan penularan PMS dan kesejahteraan psikologis pasangan-harus diperhitungkan dalam evaluasi perdata.

Kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari pernikahan karena membantu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pernikahan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan agama untuk melindungi kesehatan reproduksi dan meminimalisir potensi bahaya.

Pernikahan kontrak dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Misalnya, karena kawin kontrak tidak sesuai dengan persyaratan agama dan hukum, maka kawin kontrak dianggap sebagai semacam prostitusi terselubung. Peneliti mengklaim bahwa karena sifat normatif dari metode ini, pembahasan mengenai pernikahan kontrak masih belum lengkap. Dengan menggunakan pendekatan normatif. Hukum Islam hanya membahas teori, ide, dan konsep tanpa berusaha mengidentifikasi keadaan sebenarnya di balik penggunaan kontrak. Untuk memberikan respon yang lebih mennyelurus kepada hukum Islam terhadap dilema kontrak, peneliti percaya bahwa kontrak harus diperlakukan dari perspektif yang lebih humanis dan antroposentris dengan menggunakan metodologi antropologi dan sosial.

Masyarakat akan menentukan apakah kontrak menyebabkan kerusakan atau kebaikan dengan membiarkan kejadian kontrak muncul. Peneliti berpendapat bahwa akademisi hukum saat ini harus menangani masalah-masalah sosial melalui studi daripada hanya memberikan argumen untuk menyelesaikan kesulitan masyarakat.[[8]](#footnote-8) Ketertarikan penulis untuk melakukan studi atau penelitian lebih lanjut terlihat dari uraian yang telah disampaikan di atas, dan dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul ”**Implikasi Perjanjian Kawin Kontrak Terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Kajian Keperdataan”**

## Rumusan Masalah

Indonesia memberlakukan hukum agama untuk sahnya perkawinan, dalam penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perjanjian perkawinan kontrak terhadap kesehatan reproduksi dalam kajian regulasi Kesehatan ?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan kontrak terhadap kesehatan reproduksi ?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari investigasi ini, sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, adalah :

1. Untuk mengkaji penerapan perjanjian perkawinan nikah kontrak terhadap kesehatan reproduksi dalam kajian keperdataan
2. Untuk mengkaji dampak dari pernikahan nikah kontrak terhadap kesehatan reproduksi

## Manfaat Penelitian

Hal ini diharapkan dapat membantu mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini :

1. Secara Teoretis

Guna memberikan pemahaman dan informasi yang dapat dipergunakan untuk situasi sosial atau penerapan teori yang dipelajari di sekolah.

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan, mampu memberi pedoman untuk mengevaluasi apakah pernikahan kontrak mendorong atau bahkan menghambat kesehatan reproduksi di masyarakat diharapkan akan tersedia.

## Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitiannya, penulis melihat sejumlah tesis dan penelitian tesis sebelumnya yang memiliki banyak kesamaan dengan penelitian ini, tetapi berbeda dalam hal topik bahasan, lokasi komponen penelitian, atau teknik analisis yang dipergunakan. Penelitian-penelitian berikut ini berkaitan dengan penelitian ini :

1. “Kawin Kontrak dalam Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” sebuah penelitian atau tesis yang ditulis oleh Renny Widhayantie F., seorang mahasiswa “Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia”. Sejumlah isu seputar kawin kontrak juga memenuhi kriteria tesis tersebut. Di antaranya adalah dampak negatif dari realitas kawin kontrak, posisi MUI sebagai organisasi keagamaan dan keikutsertaannya dalam kampanye penghapusan kawin kontrak, serta konsekuensi hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hingga pada titik di mana masyarakat mempraktikkan pelaksanaan kawin kontrak.[[9]](#footnote-9) Studi penelitian ini mencakup kesamaan pemelitian penulis yaitu memiliki persamaan dalam pembahasan dampak hukum bagi para pihak. Sedangkan keduanya juga memiliki perbedaan, yang mana penulis membahas secara rinci dampak-dampak yang akan dialami para pihak.
2. Artikel penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roy Purwanto mahasiswa “Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta” dengan judul Artikel “*nukah kontrak dan implementasinya dalam kehidupan social (Studi Kasus Nikah Kontrak di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur).”* Menurut penelitian ini, kontrak di desa Kalisat memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Meskipun tidak signifikan secara statistik, ekonomi masyarakat telah mendapat manfaat dari peningkatan tersebut. Di sisi lain, terdapat kerugian secara sosial, psikologis, dan budaya. Secara psikologis, kontrak menyebabkan pergeseran kondisi mental dan ketidakstabilan dalam perilaku dan proses berpikir pelaku. Keberadaan mur'ah memberikan dampak negatif secara sosial dan budaya, seperti menurunkan posisi sosial perempuan dan penduduk Kalisat serta mengangkat status sosial anak secara tidak tepat.[[10]](#footnote-10) Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam membahas dampak nikah kontrak pada para pihak. Sedangkan keduanya memiliki perbedan dalam permasalahannya,dalam penelitian tersebut mengangkat kasus kasus di Desa Kalisat, sedangkan penelitian penulis membahas teori-teori hukum tersebut.
3. Artikel penelitian yang dilakukan oleh Khairil Ikhsan Siregar mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan judul artikel “*Nikah Kontrak Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.”* Dengan beberapa alasan, peneliti merasa terdorong untuk memilih judul penelitian ini: pertama, hadis yang berkaitan dengan matannya harus dikedepankan; kedua, peneliti merasa penasaran dengan sejauh mana tuduhan kelompok Syi'ah terhadap pemahaman kelompok Ahlissunnah wal Jama'ah terhadap hadis-hadis tentang nikah kontrak itu benar adanya; dan ketiga, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat para ulama tentang nikah kontrak.[[11]](#footnote-11) Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama dalam membahas pengertian nikah kontrak dan pandangan-pandangan para peneliti. Sedangkan keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan, penelitian tersebut hanya membahas nikah kontrak dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadist serta para peneliti hukum saja, sedangkan penelitian penulis juga membahas peraturan apa saja yang membahas nikah kontrak.

Dari kajian-kajian yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa nikah kontrak secara konsisten memunculkan beragam isu dalam kajian dengan fokus yang berbeda-beda. Namun, kajian penulis yang akan menganalisis tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik nikah kontrak ini akan berkonsentrasi pada nikah kontrak yang dapat menjadi pemicu gangguan terhadap kesehatan reproduksi dalam kajian studi keperdataan.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi penelitian yang dipergunakan penulis ialah jenis studi yang bersifat penelitian lapangan (Field Research), yaitu studi yang menjelaskan peristiwa dan kondisi yang memberikan kejelasan tentang skenario yang terjadi adalah yang dipergunakan penulis dalam studi lapangannya.[[12]](#footnote-12)

1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini terdiri dari dua pendekatan: pendekatan konseptual didasarkan pada perspektif dan doktrin yang berkembang di masyarakat, sedangkan pendekatan perundang-undangan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Teknik hukum empiris yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti data primer yang dikumpulkan dari masyarakat.[[13]](#footnote-13)

1. Data Penelitian

Penulis skripsi ini memutuskan untuk menggunakan data sekunder. Edi Riadi mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder ini dapat ditemukan di beberapa sumber, termasuk situs web dan sumber-sumber yang terkait dengan proyek studi saat ini.[[14]](#footnote-14) Data sekunder dari model penelitian literatur akan dipergunakan oleh penulis. Mukhadis, Ibnu, dan Dasna menyatakan bahwa ada tiga tempat untuk menemukan sumber studi literatur :[[15]](#footnote-15)

* 1. Bahan Hukum primer

Semua peraturan hukum dibuat dan/atau dibuat secara sah oleh organisasi pemerintah dan/atau lembaga negara yang berwenang, dan penegakannya dapat ditegakkan dengan menggunakan otoritas pemaksaan yang secara resmi dijalankan oleh aparatur negara. seperti undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, literatur yang berkaitan dengan subjek ini, esai yang ditulis oleh para profesor dan mahasiswa dari berbagai universitas, publikasi ilmiah dan jurnal, dan sebagainya.

* 1. Data Sekunder

Sumber bahan sekunder dapat berupa makalah penelitian, buku, jurnal, dan literatur mengenai isu yang sedang diteliti merupakan contoh dokumen hukum sekunder. Jurnal, literatur, buku, dan makalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti adalah contoh dokumen hukum sekunder.

* 1. Data Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang ada atau disebutkan oleh penulis penelitian ini sebagai penjelasan dan petunjuk dari dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan situs-situs web yang relevan merupakan contoh publikasi hukum tersier.

Sedangkan penulis hanya akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini diambil dengan kepustakaan. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu mencakup :

“Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

“Pasal 71 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, penelitian ini melakukan studi literatur baik secara online maupun offline. Peneliti memperoleh data sekunder yang terkait dengan subjek yang diteliti, yang kemudian dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan tujuan dan permasalahan. Sebuah penelitian membutuhkan data yang lengkap, dan dalam hal ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang relatif tinggi.

1. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang dipergunakan. Analisis terhadap data kualitatif-yaitu data yang terdiri dari rangkaian kata-kata-dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan bahan yang telah dikumpulkan, dianalisis, didokumentasikan, dan dihubungkan secara logis dengan fakta-fakta lain sebelum dirangkai atau disajikan dalam bentuk tulisan hukum.[[16]](#footnote-16) Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai Implikasi Perjanjian Perkawinan Kontrak Terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Kajian Keperdataan.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini memberikan ringkasan dan struktur proyek untuk membantu dalam mempelajari keseluruhannya. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur dan topik skripsi ini, sistematika makalah ini disajikan sebagai berikut.:

Bab I : Pendahuluan Bagian ini memberikan ringkasan singkat mengenai komponen-komponen penulisan ilmiah, termasuk Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Studi, Tinjauan Pustaka, Metodologi Studi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : tinjauan pustaka merupakan bab yang berisikan tentang evaluasi dasar yang menjadi landasan dalam menyusun karya tulis, yang meliputi: tinjauan umum tentang pengertian Nikah, tinjauan umum tentang kawin kontrak, tinjauan umum tentang dampak terhadap kesehatan reproduksi, serta berbagai tinjauan yang relevan dengan masalah penelitian skripsi ini.

Bab III : Pembahasan dan Hasil Penelitian Bab ini menyajikan pembahasan mengenai data yang diperoleh dari penelitian, yang telah diperiksa ulang secara menyeluruh dan kemudian dibahas secara berurutan dan sistematis.

Bab IV : penutup, kesimpulan serta saran merupakan dua substansi materi yang menyusun bab terkahir ini.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPSUAL

### Tinjauan Tentang Nikah

* 1. **Pengertian Nikah**

Pemaknaan perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, perihal ini disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”1 Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “Nakaha-yankihu-nikah” yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” dan “berkumpul” Hal ini senada dengan pendapat beberapa ulama Fiqh, yang memberikan arti dasar kata “Nikah” dengan makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “memasukkan dipakai dalam pengertian bersetubuh”[[17]](#footnote-17) Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Aldin al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah : “*Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.”[[18]](#footnote-18)*

Sebaliknya, pernikahan-yang didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”-disebutkan dalam “UU No. 1 Tahun 1974” sebagai pengganti frasa “Nikah.” Selain itu, hal ini dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 1 “UU No. 1 Tahun 1974” yaitu “sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunya hubungan yang erat sekali dengan Agama/Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin /rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula meruapakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”[[19]](#footnote-19)

Pernikahan dalam Islam, yang juga dikenal dengan sebutan nikah, adalah sebuah kontrak atau perjanjian untuk mengikat seorang pria dan wanita yang menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya selama keduanya bersedia dan mampu untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, dan penuh kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.[[20]](#footnote-20)

Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di antara keduanya, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”[[21]](#footnote-21)

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, kata “nikah” merujuk pada akad dalam arti sebenarnya (hakiki), dan merujuk pada hubungan seksual dengan lawan jenis dalam arti semu (majazi).
2. Ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang berlawanan dengan ulama Syafi'iyah, yaitu bahwa kata nikah memiliki arti sebenarnya (hakiki), dan memiliki arti tidak sebenarnya (majazi) yaitu sebuah akad yang membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.[[22]](#footnote-22)
3. Tiga ulama - Hanabilah, Abu Qasim Al-Zajjad, Imam Yahya, dan Ibnu Hazm - sepakat bahwa kata “nikah” mencakup dua aspek secara bersamaan - kontrak dan hubungan intim - dalam dua makna alternatif yang dinyatakan dalam dua pendapat di atas.[[23]](#footnote-23)

Berkeluarga merupakan sunnah para Rasul dari awal hingga Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan Al Qur'an “Surat Ar Ra'd ayat 38” yang artinya: “*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.*”

Selain hukum yang digariskan dalam Al-Qur'an, Rasul juga memiliki hadis-hadis lain tentang hukum pernikahan, yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, Jama'ah, dan Imam Muslim. Hadis-hadis tersebut berbunyi “*...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku.*” Hadis tambahan dari Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi “*Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.*”[[24]](#footnote-24)

Ibnu Rusyd, yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menyatakan dalam bukunya tentang hukum pernikahan bahwa sekelompok fuqaha, atau jumhur (mayoritas ulama), meyakini bahwa pernikahan adalah sunnat. Kelompok Zhahiriyah percaya bahwa pernikahan adalah wajib. Menurut ulama Malikiyah mutaakhkhirin, pernikahan hukumnya wajib bagi orang-orang tertentu, sunnat bagi yang lain, dan mubah bagi yang lainnya. Penafsiran ayat-ayat perintah dan kebiasaan yang ada di sekitar masalah ini menjadi penyebab perbedaan pendapat ini.[[25]](#footnote-25)

Ada tiga definisi untuk istilah pernikahan. Yang pertama adalah merujuk pada hubungan intim dan makan; pohon dikatakan menikah ketika mereka membuahi dan berkumpul bersama. Secara majaz, pernikahan juga disebut sebagai kontrak karena melalui kontrak inilah kita dapat melakukan aktivitas seksual. Menurut Abu Hanifah, pernikahan adalah akad Wati', bukan Wat'un (persetubuhan). Lebih jauh lagi, secara hakiki, nikah adalah akad, dan secara majaz, nikah adalah wat'un (hubungan antar pribadi) yang menyeimbangkan pengetahuan secara bahasa. Ada dalil lain yang menyatakan bahwa nikah adalah akad, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadist. Pendapat inilah yang paling mudah ditafsirkan, atau lebih unggul, menurut ajaran Imam Malikiyah dan Syafi'yah. Ketiga, pengertian nikah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Wati dan Akad, karena nikah terkadang dikaitkan dengan Wati dan terkadang dengan Akad (ikatan intim).

* 1. **Ruang Lingkup Nikah**

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari rukun dan syaratnya, yaitu sebagai berikut syarat dan rukun pernikahan adalah hal yang membentuk ruang lingkup pernikahan. :

1. Adanya calan penganten pria
2. Adanya calon penganten wanita
3. Adanya wali pihak penganten wanita
4. Adanya saksi, minimal dua orang
5. Adanya ijab juga qabul[[26]](#footnote-26)

Agar pernikahan dapat terlaksana, kehadiran calon pengantin adalah hal yang penting. Oleh karena itu, karena kedua belah pihak bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan, sangat penting untuk memastikan siapa yang akan menjadi calon suami atau istri.[[27]](#footnote-27) Jika identitas calon suami dan istri tidak jelas, pernikahan tidak akan diakui.

Dalam Islam, keluarga memainkan peran penting dalam kehadiran seorang wali karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pengantin wanita. Dengan demikian, tanpa wali, pernikahan tidak dapat dianggap sah. Pernikahan juga harus disaksikan oleh banyak orang yang ditunjuk sebagai saksi selama upacara pernikahan karena pernikahan adalah langkah pertama menuju kehidupan keluarga dan keluarga adalah langkah pertama menuju kehidupan sosial. Peraturan-peraturan tersebut diberlakukan untuk alasan tertentu sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, sama seperti hukum lainnya. Demikian juga, pernikahan memiliki sejumlah tujuan yang termasuk seperti hal dibawah ini:

1. Guna meneruskan garis keturunan yang berfungsi sebagai penyambung hidup dan penghubung yang sempurna.
2. Sejalan dengan syariat Islam, untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
3. Rasa cinta kasih antara suami dan istri dapat dipupuk melalui pernikahan.
4. Hidup berumah tangga dapat menghasilkan anak-anak yang bersih, yang dapat memberikan informasi tentang ayah, kakek, dan anggota keluarganya yang lain.[[28]](#footnote-28)

**3. Prosedur Nikah**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebuah divisi di Kementerian Agama Republik Indonesia, telah terlibat secara langsung dan aktif dalam pelaksanaan “UU No. 1 Tahun 1974” sejak diundangkan. Hal ini melibatkan dua direktorat: Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, yang didasarkan pada KMA No. 18 tahun 1975. Direktorat Urusan Agama Islam bertanggung jawab atas urusan pendaftaran. Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.” “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.” dan ”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Sesuai dengan “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995” dan “Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975”, Departemen Agama menjalankan fungsi pencatat nikah secara vertikal hingga Kantor Urusan Agama Kecamatan.[[29]](#footnote-29) Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia dimodifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Menurut teks tersebut, Pasal 2 ayat (2) PP 9/1975 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan, yang dilakukan oleh Kantor Pencatatan Sipil, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan mereka dilakukan sesuai dengan agama mereka dan tidak hanya hukum Islam.[[30]](#footnote-30)

### Tinjauan Tentang Nikah Kontrak

1. **Pengertian Nikah Kontrak**

Pernikahan yang dinyatakan hanya untuk sementara waktu dikenal sebagai pernikahan kontrak. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Dia dan pasangannya bercerai, dan dia tidak memiliki warisan. Nama lain dari pernikahan ini adalah pernikahan sementara. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa alasan mengapa dinamakan kontrak adalah karena pihak laki-laki hanya berencana untuk bersenang-senang untuk sementara waktu. Durasi akad nikah ('ajal) dan mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya (mahar) disebutkan secara tegas dan jelas dalam pernikahan kontrak.

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa dalam pernikahan kontrak, “kontrak dan jangka waktu tertentu” mengacu pada kontrak yang tidak terkait dengan keinginan bersama dan penuh cinta untuk hidup bersama sebagai suami dan istri selamanya. Untuk jangka waktu yang terbatas, kontrak semacam ini hanya didasarkan pada kebutuhan biologis. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kontrak tersebut juga menentukan batas waktu dan jenis serta jumlah mahar.

Ada pula Ulama fikih yang medifinisikan dengan “akad seorang laki-laki kepada wanita tertentu, seperti sehari seminggu atau sebulan”. Al Jaziri (ahli fikih perbadingan mazhab) mendifinisikannya dengan “nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu tertentu”. Pada dasarnya menunjukkan adanya pembatasan waktu tertentu, pembatasan waktu tersebut diungkapkan pada saat akad berlangsung, hal ini merupakan pemaknaan serupa lainnya yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki dan Syafi’i.

Nikah mu'aqqat, yang juga dikenal sebagai nikah kontrak, adalah apa yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki sebagai pernikahan yang dibatasi waktunya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ada perbedaan antara nikah kontrak dan nikah mu'aqqat, dengan mengutip penggunaan istilah kontrak dalam akad nikah kontrak (misalnya, “mata ‘tuki bin nafsi, atau ’saya nikahi kamu dengan nikah kontrak”) dalam nikah mu'aqqat. “Nikah munqati'” (nikah terputus) adalah sinonim lain dari nikah kontrak.[[31]](#footnote-31)

Menurut Ali Akbar, pernikahan juga dapat merujuk pada cara hidup bersama antara orang muda dan orang yang lebih tua yang diterima oleh masyarakat dengan tujuan menggabungkan sumber daya sosial dan ekonomi (kelompok) untuk jangka waktu yang lebih lama.[[32]](#footnote-32) Pernikahan adalah suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama, baik dari segi ibadah maupun agama. Pernikahan adalah simbol pemenuhan sebagian agama dan pelaksanaan sebagian ibadah. Secara hukum dan agama, pernikahan adalah sebuah kontrak yang kuat karena memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :

1. Pernikahan adalah persatuan sukarela antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan oleh keduanya.
2. Berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan dapat mengakhiri perjanjian tersebut.
3. Seorang wanita (istri) dan seorang pria (suami) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh perkawinan.[[33]](#footnote-33)

Demikian pula, setelah melalui serangkaian diskusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya kawin kontrak atau kawin kontrak. Menurut MUI, kawin kontrak menimbulkan banyak masalah dan keresahan bagi masyarakat secara keseluruhan. “Fatwa MUI tentang Nikah Kontrak Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997,” keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa nikah Kontrak haram hukumnya, sebagai berikut :

1. “Nikah mut`ah hukumnya adalah HARAM”.
2. “Pelaku nikah mut`ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. “Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya”.[[34]](#footnote-34)

Di sisi lain, pernikahan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sarana untuk membangun keluarga yang penuh kasih, berbakti, dan menghasilkan anak-anak yang sehat secara mental. Untuk memberi manfaat bagi negara dan bangsa secara keseluruhan, keluarga berencana yang lebih besar akan menghasilkan anak-anak yang lebih sehat. Karena keluarga adalah unit sosial terkecil dan memiliki pengaruh paling besar terhadap baik dan buruknya masyarakat, maka baik dan buruknya sebuah keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Teori hukum menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan batasan-batasan hukum yang berlaku dikualifikasikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum. Di sisi lain, tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan regulasi yang relevan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. [[35]](#footnote-35)

Di antara sebabnya, pernikahan dianggap sebagai peristiwa hukum jika terdiri dari tiga komponen hukum. :

1. Hukum Material: Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan semua kriteria hukum yang relevan dengan mengikuti semua pedoman administratif.
2. Hukum Formal: Jika pasangan ingin pernikahan mereka diakui secara resmi oleh negara, mereka harus menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
3. Hukum Administrasi: Sesuai dengan administrasi, sebuah pernikahan dilaksanakan. Hal ini memverifikasi atau membuktikan bahwa sebuah pernikahan telah terjadi atau bahwa suatu tindakan telah dilakukan secara sah.[[36]](#footnote-36)

Berdasarkan “Undang Undang Nomor. 1 pasal 2 ayat 2”, menyatakan bahwa “tiap- tiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan” Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1). dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam “Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Kemudian pernikahan yang sesuai dengan hukum adalah pernikahan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 tertulis “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah”. Selanjutnya pada ayat 2, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

1. **Ruang Lingkup Nikah Kontrak**

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan kontrak. Persyaratan tersebut, menurut ulama Syi'ah, antara lain baliqh, logika, dan tidak adanya halangan syar'i (secara syarak) untuk melakukannya, seperti adanya hubungan keluarga, kerabat, susuan, atau masih berstatus sebagai istri orang lain. Calon istri, mahar/maskawin, siqhah (akad nikah kontrak), dan batasan waktu tertentu merupakan rukun nikah kontrak yang harus dipenuhi. [[37]](#footnote-37)

Oleh karena itu, pernikahan kontrak tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, yang meliputi menjamin kelangsungan hidup keturunan, mendapatkan ketenangan jiwa, dan mengembangkan rasa kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat yang berlaku.

Keadaan ini dapat mempengaruhi dampak pernikahan kontrak dalam berbagai cara. Secara sosial, hal ini dapat berdampak pada bagaimana orang memandang pernikahan, terutama dalam budaya atau komunitas di mana pernikahan kontrak diterima sebagai suatu norma. Efeknya dapat mencakup unsur-unsur ekonomi, psikologis, emosional, dan kesehatan reproduksi dari sudut pandang individu. Pelestarian hak-hak individu menjadi masalah ketika mempertimbangkan nikah dalam konteks pengaturan perkawinan, seperti nikah kontrak. Sangatlah penting untuk memastikan dalam analisis perdata bahwa perjanjian-perjanjian semacam ini tidak melanggar hak-hak individu.

1. **Prosedur Nikah Kontrak**

Ketika seorang pria menikahi seorang wanita dalam jenis pernikahan kontrak ini, tidak ada persyaratan saksi atau wali.[[38]](#footnote-38) Selain syarat dan rukun, ada beberapa unsur lain yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Calon istri haruslah seorang muslimah atau wanita kitabiyah (Kristen atau Yahudi); dalam hal ini, disarankan untuk menikahi wanita yang bermoral, karena wanita yang tidak bermoral hukumnya makruh; (2) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad; (3) Jumlah mahar juga harus ditentukan pada saat itu juga, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[[39]](#footnote-39)

Ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh suami dan istri dalam pernikahan kontrak : [[40]](#footnote-40)

1. Sebuah kontrak dianggap batal jika, pada saat penandatanganan, hanya jumlah gaji yang ditentukan dan bukan mahar. Jika jumlah mahar ditentukan tetapi tidak ada batasan waktu, maka pernikahan tersebut dianggap sah.
2. Anak yang lahir dari pernikahan kontrak adalah milik ayahnya dan menjadi tanggung jawab suami. Kerabatnya termasuk anak-anak ayah yang lain dan anggota keluarga lain yang terhubung.
3. Meskipun seorang istri tidak dapat melarang suaminya untuk berhubungan seks dengannya, ia dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kehamilan daripada menolak untuk hamil.Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.
4. Suami dan istri tidak mengajukan gugatan cerai karena pernikahan mereka dibubarkan tanpa keputusan resmi pembubaran setelah berakhirnya waktu yang ditentukan. Hal ini juga berlaku untuk masalah-masalah lain.
5. Suami dan istri tidak memiliki hak waris.
6. Anak berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, yang memiliki hak untuk saling mewarisi.
7. Berakhir masa iddah :
8. Masa iddah terjadi setelah dua kali haid jika istri adalah wanita yang masih haid. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa jika siklusnya teratur, satu bulan sudah cukup.
9. Iddahnya adalah 45 hari, jika istri adalah wanita yang haid dan tidak haid.
10. 'Iddah istri sama dengan 'iddah pernikahan permanen jika ia hamil atau suaminya meninggal dunia.
11. **Jangka Waktu Nikah Kontrak**

Seorang pria dan wanita menikah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sesuatu yang diberikan kepadanya, seperti properti, makanan, pakaian, atau barang lainnya. Mereka secara otomatis berpisah tanpa thalak dan tanpa warisan setelah jangka waktu berakhir. Seorang pria menikahi seorang wanita dengan cara ini ketika tidak ada saksi atau wali yang hadir. Kemudian, mereka menentukan mahar dan jangka waktunya tiga hari atau kurang dari itu, mana saja yang lebih dulu, biasanya tidak lebih dari 45 hari, dengan catatan tidak ada mahar selain yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak ada warisan, tidak ada masa iddah selain istibra' (satu kali haid bagi wanita monopouse, dua kali haid bagi wanita normal, dan empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya), dan tidak ada nasab.[[41]](#footnote-41)

1. **Argumentasi Terjadinya Nikah Kontrak**

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dapat menggunakan nikah kontrak sebagai alasan untuk talak ba'in, yang melarang seorang istri untuk rujuk kembali dengan mantan suaminya kecuali dia telah menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Inilah salah satu alasan mengapa nikah kontrak banyak terjadi di sekitar kita. Di sinilah pernikahan kontrak terjadi karena banyak yang percaya bahwa ini adalah cara cepat untuk menyatukan kembali mantan suami dan mantan istri.

Salah satu ulama Syafi'i, Abu Syuja, mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang sebenarnya adalah pernikahan yang sesungguhnya. Ia menyebutkan lima persyaratan bagi pasangan yang bercerai untuk kembali bersama dalam sebuah pernikahan. “Seorang suami tidak dapat menikah lagi setelah menceraikan istrinya dengan talak tiga kecuali jika lima syarat terpenuhi: masa iddah istri telah berlalu; dia harus menikah dengan pria lain (muhallil) sebelum suami dapat menikah lagi; istri telah melakukan hubungan seks dan muhallil benar-benar telah mensetubuhinya; istri telah diceraikan secara ba'in oleh muhallil; dan masa iddah istri dari muhallil telah habis. Salah satu ulama Syafi'iyah, Abu Syuja, berkata”.[[42]](#footnote-42)

Nikah kontrak juga dilatarbelakangi faktor ekonomi yang menjadi alasan pihak perempuan tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terkuat.

1. **Objek Perikatkan**

Unsur penting dari perjanjian pernikahan kontrak adalah batasan waktu, yang menandakan bahwa pernikahan tersebut bersifat sementara dan tidak abadi. Alih-alih membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, tujuan pernikahan kontrak adalah untuk memuaskan hasrat seksual suami dan istri untuk sementara waktu.

### Tinjauan Tentang Kesehatan Reproduksi

1. **Pengertian Kesehatan Reproduksi**

Makan sehat tidak hanya mengacu pada kesehatan fisik; namun juga mencakup aspek psikologis, mental, sosial, dan budaya. Kesehatan fisik mengacu pada keadaan tidak sakit dan tidak memiliki cacat fisik. Sehat bukanlah suatu kondisi, melainkan hasil dari proses adaptasi. Sehat, dalam hal ini, tidak hanya dipahami sebagai suatu keadaan, tetapi juga sebagai suatu proses untuk menjadi sehat.[[43]](#footnote-43)

Berada dalam kondisi kesehatan psikologis dan mental ditandai dengan kemampuan untuk melihat potensi diri sendiri, yang terdiri dari tiga elemen: mental, emosional, dan spiritual. Berpikir dengan berbagai cara merupakan indikasi dari pikiran yang sehat. Kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, termasuk kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, dan lainnya, merupakan indikasi dari kesehatan emosional mereka. Kesehatan spiritual ditunjukkan dengan ekspresi keimanan yang diekspresikan melalui ibadah, rasa syukur, kepercayaan, dan pujian kepada Tuhan. Secara sosial, sehat berarti berinteraksi dengan orang lain secara manusiawi tanpa menilai perbedaan penampilan, temperamen, atau karakteristik ras. Hal ini mengarah pada perasaan toleransi dan kasih sayang. Secara budaya, kesehatan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yang mengharuskan setiap individu untuk menyadari karakteristik unik mereka sendiri, seperti warna kulit, jenis rambut, dan sebagainya, yang menghasilkan toleransi dan kerendahan hati. Reproduksi, yang secara sederhana berarti “kembali” dan produksi, yang berarti “membuat atau menghasilkan”, mengacu pada proses di mana eksistensi manusia menciptakan anak-anak untuk melestarikan dirinya sendiri. Dalam hal semua aspek yang berkaitan dengan peran, fungsi, dan sistem reproduksi, kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh.

Islam berpendapat bahwa memiliki kesehatan yang baik sangat penting untuk menemukan kepuasan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, Islam berfungsi sebagai panduan yang mengatur seluruh keberadaan manusia untuk mencapai kebahagiaan, bukan hanya seperangkat aturan. Dalam upaya untuk mempertahankan dan meninggikan derajat manusia, Islam mengatur reproduksi yang sehat.[[44]](#footnote-44) Kesehatan reproduksi adalah salah satu bidang kesehatan yang menjadi perhatian utama dalam Islam. Seksualitas dan memulai sebuah keluarga berhubungan dengan kesehatan reproduksi.[[45]](#footnote-45)

Islam secara konstan menuntut para pengikutnya untuk menjunjung tinggi standar kebersihan mental, tubuh, dan spiritual. Karena kesejahteraan spiritual dan fisik diperlukan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat dan kehidupan yang bahagia di dunia, maka kesehatan fisik dan spiritual merupakan sistem yang saling terkait. Mengingat bahwa Islam memiliki hukum yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan reproduksi, jelaslah bahwa Islam, sebagai pedoman hidup, memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan reproduksi.[[46]](#footnote-46)

Umat Islam sangat menghargai kebersihan tubuh mereka karena mereka percaya bahwa jiwa yang kuat diperlukan untuk kehidupan yang baik. Menurut Imam Islam, iman hanya setengah dari kebersihan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keperawanan bagi kepercayaan Islam. Kesucian adalah simbol iman, dan mandat untuk menjaga kesucian setiap saat melibatkan persyaratan itu juga.

Dalam Islam, kebersihan terkait dengan kesehatan reproduksi. Di sisi lain, kesucian jasmani berkaitan dengan dan menonjolkan keinginan untuk mengekspresikan emosi seseorang melalui pernikahan. Pernikahan adalah sebuah penghargaan bagi wanita dan pria yang telah mencapai usia dewasa. Pernikahan adalah metode yang lebih lembut dan penuh kasih sayang untuk melindungi organ reproduksi. Setiap individu memiliki hak untuk mengatur jumlah anggota dalam kelompoknya, termasuk akses terhadap informasi yang lengkap mengenai metode konservasi sehingga mereka dapat memilih metode konservasi yang sesuai dan menyenangkan.

Menurut Asruddin, Islam memandang seksualitas sebagai tindakan yang suci dan bagian dari fitrah manusia. Alasan mengapa aktivitas seksual dianggap sebagai fitrah yang suci adalah karena seksualitas dipraktikkan dalam parameter hubungan yang sesuai dengan syariah, khususnya hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan, bukan antara pasangan sesama jenis (homoseksual) atau hewan yang dinikahi secara sah (zoofilia). Sesuai dengan Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa aktivitas seksual merupakan cara untuk mendapatkan kenikmatan bagi manusia sekaligus cara untuk melestarikan keberadaan manusia di bumi, “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang terpelajar.*” (QS al-Rum: 21)

Islam mengakui adanya hubungan antara penciptaan manusia dan proses reproduksi. Berdasarkan kodratnya, manusia memiliki kemampuan untuk beranak pinak dalam rangka memuliakan dan menyebarkan agama Islam. Reproduksi manusia menghasilkan penciptaan individu, keluarga, dan organisasi sosial yang baru. Lebih jauh lagi, reproduksi manusia merupakan proses penciptaan terbaik yang pernah ada.[[47]](#footnote-47)

*“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur” (QS. alSajdah: 7-9).*

*“Bukahkah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (kedalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan” (QS. al-Qiyamah: 37-39)*

*“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”.*

*“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. al-Hajj: 5)*

Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Allah memberi manusia kemampuan untuk bereproduksi karena cinta dan ketakwaan. Dia akan menjadi khalifah di dunia, memiliki anak, dan mengatur planet ini.

BKKBN pada tahun 2009 mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai lebih dari sekadar bebas dari penyakit atau gangguan, tetapi juga mencakup keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan sehat secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau gangguan pada semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri, definisi kesehatan ini konsisten dengan definisi WHO.[[48]](#footnote-48)

Kesehatan reproduksi menurut “Undang-Undang No. 36/ 2009” adalah “suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang utuh bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan Perempuan”.

Selain itu, menurut Azwar, setiap orang memiliki hak untuk mengontrol jumlah keluarga mereka, termasuk kemampuan untuk sepenuhnya memahami metode yang disukai dan sesuai, dan untuk menikmati kehidupan seksual mereka serta fungsi dan proses reproduksi dengan cara yang aman dan sehat. Selain itu, perlu juga dipastikan hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi tambahan, termasuk pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi, kesehatan remaja, dan lain-lain.Menurut Spielberg definisi kesehatan reproduksi meliputi:

1. Kapasitas untuk bereproduksi.
2. Kemampuan untuk memutuskan bagaimana cara bereproduksi.
3. Kapasitas untuk menjalani kehamilan dan persalinan dengan cara yang aman, dengan konsekuensi positif bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bayi yang baru lahir.
4. Tersedianya informasi mengenai metode-metode keluarga berencana yang aman, efisien, dan dengan harga terjangkau.
5. Kebebasan untuk menjalani hidup yang bahagia dan terpenuhi tanpa harus khawatir hamil atau sakit.
6. Kemampuan untuk mengurangi bahaya dan gangguan yang berkaitan dengan ginekologi pada setiap tahap kehidupan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah kondisi ideal dari kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam kaitannya dengan proses dan aktivitas sistem reproduksi.[[49]](#footnote-49)

1. **Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi**

Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut *International Conference Population and Development* (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari :

1. “Kesehatan ibu dan anak”
2. “Keluarga berencana”
3. “Pencegahan dan penangangan infeksi nemular seksual termasuk *human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS)”.
4. “Kesehatan reproduksi remaja”

Hak-hak reproduksi dan kesehatan remaja saling berkaitan. Pengakuan hak asasi manusia yang diakui secara global merupakan dasar bagi hak-hak reproduksi.[[50]](#footnote-50) Sedangakan ruang lingkup masalah kesehatan reproduksi menurut Program Kerja WHO Ke IX ditinjau dari pendekatan siklus kehidupan keluarga :

1. Kebiasaan yang memiliki konsekuensi negatif pada anak-anak.
2. Masalah kesehatan reproduksi remaja.
3. Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi.
4. Angka kematian dan kesakitan ibu dan anak selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, yang diikuti oleh bayi dengan berat badan lahir rendah dan anemia gizi.
5. Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR).
6. Kemandulan yang berhubungan dengan PMS.
7. Kemungkinan lebih tinggi terkena kanker organ reproduksi, serta sindrom pra dan pascamenopause (andropause).
8. Kekurangan hormon yang menyebabkan osteoporosis dan masalah lain yang berkaitan dengan usia.

Oleh karena itu, ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, remaja, lansia, sindrom pra dan pasca menopause, infertilitas, ISR/PMS, keluarga berencana, morbiditas dan mortalitas yang berkaitan dengan ibu dan anak, kekurangan hormon yang menyebabkan osteoporosis, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan lansia. Pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual, seperti HIV dan AIDS, kesehatan reproduksi remaja, penanganan komplikasi aborsi, deteksi dini kanker saluran reproduksi, dan kesehatan reproduksi remaja merupakan bidang utama yang menjadi fokus utama para peneliti dalam penelitian ini.[[51]](#footnote-51)

1. **Faktor-Faktor Pengaruh Dalam Kesehatan Produksi**

Terdapat Beberapa faktor yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi, diantaranya:

1. Faktor sosial ekonomi dan demografi

Notoatmodjo menegaskan bahwa alasan sosioekonomi dan demografi yang utama adalah kemiskinan, tinggal di daerah yang jauh, berpendidikan rendah, ketidaktahuan akan perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta tinggal di daerah terpencil.[[52]](#footnote-52) Pinem menyatakan bahwa faktor sosioekonomi dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan seseorang. Ia kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan faktor demografi, seperti usia pertama kali melakukan aktivitas seksual, pernikahan, atau kehamilan, sementara faktor sosial ekonomi dapat ditentukan dengan melihat status pekerjaan seseorang, tingkat kemiskinan, rasio melek huruf, dan proporsi remaja yang tidak bersekolah atau buta huruf. Remaja yang buta huruf tidak memiliki akses terhadap pengetahuan yang diperlukan dan mungkin tidak dapat membuat keputusan terbaik untuk kesehatan mereka.

1. Faktor budaya dan lingkungan.

Hal ini termasuk adat istiadat yang berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, anggapan bahwa memiliki banyak anak sama dengan keberuntungan, dan pengetahuan yang bertentangan tentang reproduksi yang menyesatkan anak-anak dan remaja.

1. Faktor psikologis

Notoatmodjo menyoroti dampak dari perselisihan keluarga terhadap remaja, ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan kesedihan, dan perasaan tidak berharga yang dialami perempuan ketika laki-laki membeli kebebasan materi untuk diri mereka sendiri. Pinem menyebutkan kekerasan di rumah atau lingkungan sekitar, tekanan teman sebaya, harga diri yang rendah, dan perselisihan dalam keluarga sebagai penyebab psikologis tambahan.

1. Faktor biologis

Notoatmdjo menyatakan bahwa faktor biologis meliputi kelainan sejak lahir dan masalah saluran reproduksi yang diakibatkan oleh PMS. Faktor biologis lainnya termasuk retardasi pertumbuhan pada remaja putri, yang dapat menyebabkan panggul sempit dan peningkatan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah di kemudian hari, kekurangan gizi kronis, anemia kronis dan kurang energi, kelainan bawaan pada alat reproduksi, kelainan akibat radang panggul, infeksi atau keganasan lain, dan gangguan pertumbuhan.

Menurut Notoatmdjo dan Pinem, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan kesehatan reproduksi. Faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan, ekonomi, informasi, lingkungan, minat, pengalaman, usia, sosial ekonomi dan demografi, budaya dan lingkungan, psikologis, dan biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dalam penelitian ini terutama difokuskan pada aspek biologis dan psikologis dari kesehatan reproduksi

1. Widhayantie Renny F ”*Kawin* *Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 TentangPerkawinan”,* hlm. 3, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136427-T%2028185-Kawin%20kontrak-full%20text.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Islam: Kitab Nikah,* (Kampus Syariah, 2009), hlm. 69, Academia.edu https://www.academia.edu/5252403/Seri\_Fiqih\_Kehidupan\_8\_Pernikahan [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muslim Imam, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), kitab Nikah. Hadis no. 2505 dan 2507. Lihat juga Imam al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), kitab Nikah. Hadis no. 2099, Hadits Shahih Bukhari - Muslim (HC) http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Shahih\_bukhari\_muslim.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), kitab Zuhud. hadis no. 1952, Shahih Sunan Ibnu Majah 1 - WordPress.com https://rahmadkhairul.files.wordpress.com/2018/07/shahih-sunan-ibnu-majah-1.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Bukhari Imam, *Jami' al Shahih al Bukhri*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), kirab Nikah. Hadis no.4723. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab Nikah. Hadis no.1951, Academia.edu https://www.academia.edu/26066186/SHAHIH\_AL\_BUKHARI [↑](#footnote-ref-7)
8. Roy Muhammad Purwanto. “*Nikah Kontrak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Social: Studi Kasus Nikah Kontrak di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur”*, (UII Yogyakarta). hlm. 154, https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/45 [↑](#footnote-ref-8)
9. Widhayantie Renny F, “*Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan”* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136427-T%2028185-Kawin%20kontrak-full%20text.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. Roy Muhammad Purwanto, “*nukah kontrak dan implementasinya dalam kehidupan social (Studi Kasus Nikah Kontrak di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur)”.* Artikel, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/45 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ikhsan Khairil Siregar “*Nikah Kontrak Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.”* Artikel, Universitas Negeri Jakarta, https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/4513/3422 [↑](#footnote-ref-11)
12. Alfarisi Salman, *Proses Pendaftaran Peberian Hak Milik Atas Tanah yang Dikuasai Negara pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Pemalang*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Sekar Meita Sari, Zefri Muhammad, Jurnal Ekonomi, 21 (3), 2019 : 4. https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kusumastuti Adhi, Mustamil Ahmad Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 51. http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm. 5, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443 [↑](#footnote-ref-16)
17. Taqiyuddin Imam bin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 36. https://www.scribd.com/document/357078300/Kitab-Kifayatul-Akhyar-pdf [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Imam bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Bandung : Maktabah Dahlan, Juz III, hlm. 109. https://www.scribd.com/document/403894348/subulus-salam-pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. Thaib Hasballah,Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010, hlm. 4. https://library.ulb.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=23808&keywords= [↑](#footnote-ref-19)
20. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), hlm. 8. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=79487 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-21)
22. Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada mulia, 2007, hlm. 36-37. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8994 [↑](#footnote-ref-22)
23. Tahido Chuzaimah Yanggo,hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* Jakarta : LSIK, 1994, hlm. 53. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1094 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Rahman Abdul Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm. 14. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22576 [↑](#footnote-ref-25)
26. IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* Surabaya; Karya Anda, t.th, hlm. 24. http://etheses.iainponorogo.ac.id/28206/1/Skripsi%20Sania%20Nur%20Nafisa.pdf [↑](#footnote-ref-26)
27. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 17. http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku\_Ajar\_Hukum\_Perkawinan\_(2).pdf [↑](#footnote-ref-27)
28. Tholib M. (Ed), *Analisa wanita dalam Bimbingan islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1997), hlm. 119-124. https://opac.iainpare.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=253 [↑](#footnote-ref-28)
29. Idris Mohd Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 179. https://onesearch.id/Author/Home?author=Ramulyo%2C+Mohd.+Idris [↑](#footnote-ref-29)
30. Kuncoro Wahyu, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, ( Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010). hlm. 12. https://perpustakaan.probolinggokota.go.id/opac/detail-opac?id=17277 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ali Muhamad, M.sy. *Hukum Nikah Kontrak Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah,* Indramayu 2016, hlm. 31-32. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\_Risalah/article/download/23/18/36 [↑](#footnote-ref-31)
32. Anjani Andini, Puteri Djakarta *Seminar Hukum Perkawinan* (Djakarta: Gunung Sahari,1998), hlm. 31. http://digilib.uin suka.ac.id/36329/1/02541124%20%20BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,*hlm. 32. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pengurus Pusat MUI, Fatwa MUI tentang Nikah Kontrak Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997, Jakarta : Pengurus Pusat MUI, 2004, hlm. 3. https://mui.or.id/baca/fatwa/nikah-mutah [↑](#footnote-ref-34)
35. Sinaulan Lina Ramlani, ”TEORI ILMU HUKUM”, Bandung; Zahir Publishing, 2021, hlm. 29. https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data\_file/1503/TEORI%20ILMU%20HUKUM.pdf [↑](#footnote-ref-35)
36. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.74. https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9454&bid=8950 [↑](#footnote-ref-36)
37. HB. Baidhowi, *Maraknya Nikah Kontrak di Indonesia Sebuah Penomena Hukum,* hlm. 7. https://ms-aceh.go.id/data/nikah\_kontrak.pdf [↑](#footnote-ref-37)
38. Ja’far Abu Muhammad bin Ya’kub bin Ishaq Kulaini Razi, al-Kafi Fiy Ilm al-Din, (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Jilid V, hlm. 455. Abu Ja’far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, Tahzib al- Ahkam,(Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Juz VII, hlm. 255. http://repository.uin-suska.ac.id/5366/2/BAB%20I.pdf [↑](#footnote-ref-38)
39. Syukri Mahmud al-Alusi, Mukhtashar Itsna Asy’ariah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 227-228. Lihat Ali al- Salus, ‘Aqidah al-Imamah ‘Inda al-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah, (Bandung ; Mizan, 2007), hlm. 116. https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html [↑](#footnote-ref-39)
40. HB. Baidhowi, *Maraknya Nikah Kontrak di Indonesia Sebuah Penomena Hukum,* hlm. 7-8. https://ms-aceh.go.id/data/nikah\_kontrak.pdf [↑](#footnote-ref-40)
41. Al-Adawi Musthafa, al-Shan’ani, Subulus Salam Juz III, hlm. 169-170, (Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, tt), Juz III, hlm. 243. Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut : Dar Alam Kutub, tt), Juz X, hlm. 46. https://id.scribd.com/document/500708869/Pernikan-Yang-Dilarang-Dan-Diperselisihkan [↑](#footnote-ref-41)
42. Syuja Abu, al-Ghayah wat Taqrib, Alam al-Kutub, hlm. 33. https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/pak-ustad-saya-telah-ditalak-bain-masih-bolehkah-diajak-rujuk-WASk9 [↑](#footnote-ref-42)
43. Nurcahyo Heru, *Ilmu Kesehatan*: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008), hlm. 2. https://mirror.unpad.ac.id/bse/Kurikulum\_2006/10\_SMK/kelas10\_smk\_ilmu-kesehatan\_heru.pdf [↑](#footnote-ref-43)
44. Widyowati Asih, “*Islam dan Kesehatan Reproduksi*”, 2009, hlm. 3. https://www.fahmina.or.id/penerbitan/warkah-al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-%20.html,%20diakses%2027%20Maret%202016. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibrahim Tuslim, *Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga Menurut Fiqh*, Aceh: MPU Aceh, hlm. 2. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1456/1080 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-46)
47. Uyun Zahrotul, “*Peran Orang Tua dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi*”, hlm. 362. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1456/1080 [↑](#footnote-ref-47)
48. Susanne Dida, *et.al.* *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*. Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komuniasi, hlm. 9. https://ejurnal.bkkbn.go.id/kkb/article/download/25/24 [↑](#footnote-ref-48)
49. Sastriwati, “*Memperkuat* Pengetahuan *tentang* Kesehatan Reproduksi” (UIN Suska Riau, 2023), hlm. 16-18. https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/download/1509/1705/8580 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*. hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*. hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-51)
52. Nalasari Pratiwi, *Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Demografi Terhadap Jumlah Anak Yang Pernah Dilahirkan Hidup Di Kecamatan Pesantren Kota Kediri*. (UIN Suska Riau, 2023), hlm. 16-18. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/8604/8697 [↑](#footnote-ref-52)